

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Partisipasi masyarakat merupakan dasar pelaksanaan demokrasi sesuai dengan cita-cita negara demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Sehingga prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat merupakan kesatuan penting dalam rangka pembangunan tak terkecuali pembangunan di setiap daerah. Aspek yang sangat penting didalam sebuah tatanan dalam negara yang menganut demokrasi adalah tentang partisipasi politik. Hal ini menjadi salah satu ciri khas adanya demokrasi didalam suatu negara. Jalannya pemerintahan sangat dipengaruhi oleh partisipasi politik. Hubungan antara demokrasi dengan partisipasi politik adalah dengan adanya partisipasi, maka hal ini akan berpengaruh pada legitimasi masyarakat dan pemerintah nantinya dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik. Dan dari pihak masyarakat memiliki pilihan masing-masing dalam menentukan pilihannya di dalam pemilu (Hendrik, 2008).

Keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan daerah merupakan sesuatu yang penting, termasuk dalam menentukan/memilih kepala daerah. Sesuai hasil reformasi pemerintahan maka pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan dengan model pemilihan langsung, di mana rakyat diberi hak untuk memilih langsung kepala daerahnya baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya

itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dijadikan sebagai kendali dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Kemudian kendali yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat beragam, dipengaruhi oleh keikutsertaan dalam dunia politik di masing-masing daerah. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan hak politik yang harus diberikan oleh negara. Salah satu bentuk pemenuhan hak politik yaitu dengan adanya kesempatan bagi warga negara untuk menyatakan pendapat dan berkumpul (Wirahmat, 2013).

Partisipasi politik masyarakat juga tidak dapat terlepas dari kondisi dan sistem politik yang sedang berjalan di negara tersebut. Hingga saat ini sistem politik di Indonesia berkali-kali telah mengalami perubahan, yang dimulai dari orde lama hingga masa reformasi. Banyak yang beranggapan bahwa reformasi sering dimaknai sebagai masa yang lebih demokratis. Dalam proses transformasi politik, pilkada merupakan bagian yang sangat penting dalam penataan struktur kekuasaan agar nantinya dapat lebih menjamin berfungsinya mekanisme di antara lembaga politik dari tingkat pusat hingga tingkat yang lebih rendah seperti tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi (Santi Lusiani, 2017).

Dijelaskan lebih lanjut oleh J. Kaloh bahwa pilihan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung merupakan keputusan politik strategis dan layak dicatat sebagai peristiwa politik yang melampaui nilai-nilai bahkan doktrin-doktrin yang tertanam lebih dari setengah abad, yaitu sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan). Pilkada langsung merupakan antitesis terhadap demokrasi perwakilan. Ini terjadi karena demokrasi perwakilan telah memberikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, digantikan oleh wakil-wakil rakyat yang

dalam pelaksanaannya bersifat oligarkis dan kurang mencerminkan kepentingan rakyat.

Dalam hal ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di lingkup daerah untuk dapat secara langsung ikut menentukan sendiri pilihan mereka. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton dalam dunia politik, saat ini masyarakat dapat secara langsung menentukan pilihannya, seperti memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ataupun walikota dan wakil walikota. Sistem ini dapat dikatakan lebih menjanjikan dibandingkan dengan sistem sebelumnya karena dalam pilkada langsung masyarakat meyakini bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk memilih tanpa adanya kekerasan dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun, dan adanya penekanan di jalur birokrasi (Suharyanto, 2014).

Pertimbangan pemilih dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya yaitu yang pertama kondisi awal pemilih, yang kedua yaitu media massa dan ketiga adalah partai politik atau kontestan. Kemudian dari ketiga faktor tersebut pemilih nantinya dapat dikategorikan sebagai pemilih yang rasional, pemilih yang kritis, dan pemilih yang tradisional. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa yakin bahwa kandidat yang diyakini akan mampu membawa aspirasi mereka. Sikap yang seperti ini yang nantinya akan memberikan kekuatan sosial dan dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih calon yang maju untuk dipilih. Memilih merupakan salah satu bentuk hak politik sebagai warga negara dalam proses pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif adalah hak

politik warga negara yang mengandung kebebasan pemilik hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya (Wicaksono, 2009).

Golput dibagi menjadi beberapa macam. golput dibagi menjadi empat macam, yang pertama adalah golput teknis yaitu masyarakat tidak datang ke TPS karena alasan teknis. Kemudian yang kedua adalah teknis politis, yaitu adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh KPU. Yang ketiga yaitu golput politis, yaitu masyarakat merasa tidak memiliki kandidat yang dia pilih. Yang keempat adalah golput ideologis, yaitu masyarakat tidak percaya lagi dengan mekanisme sistem demokrasi yang ada di Indonesia (Octavia, 2015).

Kemudian alasan orang untuk memilih golput diantaranya adalah:

1. Alasan teknis administrative ; yaitu masyarakat memilih untuk tidak datang dan berhalangan hadir karena pemilih harus melakukan pekerjaan. Dapat juga masyarakat malas untuk datang karena malas untuk mencoblos ke TPS
2. Faktor teknis-politis; yaitu seseorang terganjal dengan sistem pendaftaran pemilih. Karena dalam pemilihan umum, calon pemilih harus terdaftar di daftar pemilih tetap.
3. Faktor ideologis; dalam hal ini masyarakat sudah tidak percaya terhadap mekanisme demokrasi dan masyarakat tidak ingin terlibat. Masyarakat sudah tidak percaya dengan sistem yang sudah berjalan di dalam pemerintah.

Tabel 1 : partisipasi pemilih gubernur dan wakil gubernur di kabupaten
blora tahun 2018

NO	KECAMATAN	DPT	HASIL PUNGUTAN SUARA (PILGUB 2018)		
			PEMILIH	PROSEN TASE PEMILIH	PROSEN TASE GOLPUT
1	BLORA	71264	47605	67%	33%
2	JEPON	49004	31810	65%	35%
3	BOGOREJO	20093	12848	64%	36%
4	BANJAREJO	47.670	28.112	59%	41%
5	TUNJUNGAN	36884	21940	59%	41%
6	CEPU	56868	37.692	66%	34%
7	JIKEN	31.117	18.552	60%	40%
8	SAMBONG	22481	14064	63%	37%
9	KEDUNGTUBAN	45316	25681	57%	43%
10	RANDUBLATUNG	59330	38285	65%	35%
11	KRADENAN	32417	20674	64%	36%
12	JATI	39851	27751	70%	30%
13	NGAWEN	47615	28438	60%	40%
14	KUNDURAN	52185	32708	63%	37%
15	TODANAN	50473	30870	61%	39%
16	JAPAH	28255	17162	61%	39%
JUMLAH		690823	434192	63%	37%

Sumber: KPU Blora

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

antusiasme masyarakat dalam pemilihan umum khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur cukup rendah.

Tabel 2 : partisipasi pemilih bupati dan wakil bupati Blora tahun 2015

NO	KECAMATAN	DPT	HASIL PUNGUTAN SUARA (PILKADA 2015)		
			PEMILIH	PROSENTASE PEMILIH	PROSENTASE GOLPUT
1	BLORA	72.836	53.537	74%	26%
2	JEPON	49.236	37.172	75%	25%
3	BOGOREJO	20.397	15.351	75%	25%
4	BANJAREJO	48.562	34.885	72%	28%
5	TUNJUNGAN	37.125	28.026	75%	25%
6	CEPU	59.424	41.224	69%	31%
7	JKEN	31.208	22.212	71%	29%
8	SAMBONG	23.965	15.801	66%	34%
9	KEDUNGTUBAN	46.253	32.669	71%	29%
10	RANDUBLATUNG	63.365	43.035	68%	32%
11	KRADENAN	33.274	23.432	70%	30%
12	JATI	41.008	28.220	69%	31%
13	NGAWEN	48.001	33.534	70%	30%
14	KUNDURAN	53.087	38.010	72%	28%
15	TODANAN	51.428	37.456	73%	27%
16	JAPAH	28.335	21.044	74%	26%
JUMLAH		706.604	505.842	72%	28%

Sumber: KPU Blora

Dari kedua tabel di atas, angka pemilih pada pemilihan gubernur jauh lebih sedikit dibandingkan pemilih pada pemilihan bupati. Pada pemilihan bupati tahun 2015 silam, masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya jauh lebih banyak. Menurut Ramlan Surbakti perilaku masyarakat dalam memilih merupakan keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian aktifitas yang sangat fundamental bagi sebuah sistem negara . kemudian nantinya dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki perilaku memilih maupun tidak memilih dalam pemilu dikarenakan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda.

Data dari tabel 1 dan tabel 2 memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu masih rendah. Angka golput dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Blora mencapai 37%, dan angka golput pada saat pemilihan kepala daerah dalam hal ini yaitu bupati tingkat pemilih yang golput hanya sebesar 28%. Hal ini tentunya menjadi masalah dalam konteks pemilu karena masyarakat enggan untuk datang ke TPS dan memilih untuk golput. Dari perbandingan data diatas, pemilih pada pemilihan bupati pada tahun 2015 jauh lebih tinggi dibanding dengan pemilihan gubernur. Hal ini menjadi perhatian yang menarik bagi penulis untuk mengetahui penyebab masih banyaknya pemilih yang golput di pilgub tahun 2018.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Blora tahun 2018?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Blora tahun 2018.

2. Manfaat penelitian

a) Teoritis

1. Diharapkan mampu memberikan manfaat dalam sumbangsih ilmu di bidang politik dan pemerintahan, serta pendidikan politik yang seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
2. Diharapkan menjadi pertimbangan bagi KPU untuk mengambil keputusan, agar partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat.

b) Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap penelitian berikutnya bagi mahasiswa mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi dalam pemilu.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan partisipasi politik

dalam pemilihan umum. Untuk masyarakat sendiri, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendorong partisipasi politik di dalam pemilukada.

1.4 STUDI TERDAHULU

Dalam penelitian yang berjudul *Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik* yang ditulis oleh Ade Muslimat menjelaskan bahwa Keterlibatan wanita dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Sedikitnya perwakilan dari kalangan wanita di dalam dunia politik salah satunya disebabkan oleh kondisi budaya di Indonesia. Tingginya budaya patriarki yang sangat melekat salah satunya menjadi penghalang bagi wanita untuk menjadi perwakilan wanita di dalam legislatif, wanita masih dianggap lemah oleh beberapa kalangan untuk dapat bertarung di dunia politik (Muslimat, 2008).

Kemudian, penelitian yang berjudul *Faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif 2009* yang ditulis oleh Andriyus S.Sos menjelaskan bahwa di kecamatan senggigi hilir ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik pada pileg. Faktor internal yang paling dominan yaitu kesadaran politik. Dan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik adalah perilaku kandidat (Andriyus, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Mukti yuda Wibawa, Dra.Hermini S, M.Si, Drs. Susilo Utomo yang berjudul *Analisis Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013* menjelaskan bahwa Fenomena Golput dalam Pilgub Jateng, salah satunya dikarenakan alasan teknis ekonomis dan alasan politis. Alasan ideologis juga tidak begitu besar pengaruhnya dan alasan menolak pilgub sebagai cara untuk memilih pemimpin secara langsung tidak dijadikan

sebagai salah satu alasan yang bersifat ideologis dan masyarakat menjadi enggan untuk datang ke TPS (Wibawa, 2014).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Lita Tyesta A.L yang penelitiannya berjudul Implikasi partisipasi masyarakat pada pilkada serentak dalam Meningkatkan demokrasi konstitusional di Indonesia menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 mengalami proses yang fluktuatif bahkan juga menurun, kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat belum begitu maksimal yaitu dikarenakan oleh faktor sosial, politik, administrasi, pendidikan, budaya dan pekerjaan serta sosialisasi yang masih sangat kurang, kemudian upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki regulasi yang sudah tidak sesuai dengan konteks dan melibatkan stakeholder yang ada serta meningkatkan sosialisasi (Tyesta, 2019).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Cahyo Giri Harjo, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif kota Tanjungpinang tahun 2014, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik adalah kebingungan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat (Harjo, 2014).

Dalam penelitian yang berjudul Analisis penyebab masyarakat tidak Memilih dalam pemilu yang ditulis oleh Bismar Arianto menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak memilih dan memilih untuk golput dari pemilu ke pemilu

menunjukkan angka yang terus meningkat. Dari penelitian ini tergambar bahwa ada lima faktor yang membuat orang tidak datang ke tempat memilih. Faktor yang pertama adalah faktor teknis. Kemudian yang kedua faktor pekerjaan, yang ketiga yaitu faktor administratif. Faktor yang berikutnya adalah sosialisasi politik (Arianto, 2011).

Penelitian yang berikutnya ditulis oleh Sakir, penelitian ini berjudul Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Bantul, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa nantinya perlu adanya upaya untuk menyadarkan masyarakat agar sebagai pemilih masyarakat dapat menganggap bahwa pemilu merupakan hak sebagai warga negara dan bukan merupakan suatu kewajiban sehingga nantinya pemilu dapat berjalan dengan baik dan dapat lebih berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah perlunya model sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sosialisasi yang kreatif dan inovatif agar pemilu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat harus meningkat khususnya pada pemilih pemula. Sebagai contoh yaitu di Desa Pamioro, sudah melaksanakan sistem angkut pemilih sehingga KPU dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu (Darumurti & Sulaksono, 2014).

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Akbar yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa didapatkan hasil bahwa masyarakat tidak mempersoalkan jalur yang dipilih oleh para kandidat calon, baik itu dari kalangan partai maupun dari

kalangan independen atau bukan jalur partai. Para pemilih di Kabupaten Gowa lebih memilih sosok atau kandidat yang berpengalaman ketimbang memilih calon dari partai itu sendiri. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kemunculan kandidat calon independen tidak begitu berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berpartisipasi (Akbar, 2016).

Penelitian yang ditulis oleh Daud M. Liando yang berjudul *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)* menjelaskan bahwa beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah undang-undang kepegiluan perlu diperbaiki terutama terkait dengan syarat bakal calon. Selama ini undang-undang tidak membatasi dimana masyarakat yang layak menjadi calon pemimpin dan calon pemimpin yang tidak layak untuk jadi calon. Nantinya penguatan kelembagaan partai politik sangat perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi partai politik terhadap calon dari partai politik sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas calon pemimpin (Liando, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sovi Nurhayati yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus* menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat adat sedulur sikep di desa Karangrowo merupakan partisipasi politik yang spektator, dimana masyarakat tidak ingin terlibat dalam dunia politik dan lebih memilih untuk menjauh dari proses politik. Tapi dalam hal memilih pemimpin, mereka juga ikut

memilih untuk datang ke TPS. Budaya politik juga masuk dalam budaya politik parokial dimana masyarakat masih sangat tradisional (Nurhayati, 2011).

Dari 10 penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan, yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah identifikasi kasus nya adalah pemilihan kepala daerah, dimana rata-rata pemilih di pemilihan kepala daerah jauh lebih besar pemilihnya dibandingkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam skala nasional. Penelitian ini mengangkat permasalahan di dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah, dimana salah satu kecamatan di kabupaten Blora pemilihnya hanya sebesar 57% saja. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Blora pada tahun 2018, dan pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni tahun 2018.

1.5 KERANGKA TEORITIK

1.5.1 PARTISIPASI POLITIK

a. Pengertian partisipasi politik

Yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah suatu masyarakat yang ikut serta dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Menurut Merian Budiarjo, mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang melibatkan sekelompok orang untuk ikut secara aktif kehidupan berpolitik

b. Faktor Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aktifitas yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. dari pendapat yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, ia menyebutkan bahwa ada dua variabel yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya angka keikutsertaan masyarakat dalam politik itu sendiri. Yang pertama dapat dilihat dari aspek kesadaran politik masyarakat, dimana kesadaran masyarakat terkait pemilihan umum menjadi kesadaran hak atau merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan pola penilaian dan bentuk apresiasi masyarakat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan bagaimana apresiasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Ada pula faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan faktor ini merupakan faktor independen atau berdiri sendiri. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk bahwa kedua faktor yang telah disebutkan di atas dapat

dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya yaitu faktor status sosial masyarakat, hubungan antara politik orang tua dengan politik orang muda, kemudian faktor pengalaman dalam organisasi. Status sosial merupakan bentuk kepemilikan orang terhadap kedudukan yang dimiliki, bisa diperoleh dari garis keturunan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

Status ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik, dimana status ekonomi yang dimaksud adalah kedudukan seseorang didalam masyarakat baik dilihat dari kekayaan, dan apapun yang dimilikinya. Apabila masyarakat memiliki kesadaran ataupun pengetahuan politik, kemudian diimbangi dengan status ekonomi dan sosial yang baik, maka masyarakat dengan sendirinya akan memiliki minat yang baik terhadap partisipasi politik.

Kemudian menurut Meyson Weymer,, keikutsertaan masyarakat dalam politik juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu

1) Modernisasi

Yang dimaksud dengan modernisasi adalah pembaruan di segala bidang yang berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan perkembangan media massa.

2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Munculnya kelas kelas baru sebagai akibat dari industrialisasi di kelas menengah dan kelas pekerja dan tidak lepas dari modernisasi.

3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi di massa modern.

Adanya Ide ide yang baru seperti, liberalisme, yang dapat membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik.

Dalam memperebutkan dan mencari massa, pemimpin politik selalu bersaing untuk mencapai suatu kemenangan.

5) adanya keikutserataan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Pengaruh dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah seringkali menumbuhkan rangsangan dari organisasi sosial dan mereka selalu melakukan tuntutan.

1.5.2 BUDAYA POLITIK

Budaya politik dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

Komponen Kognitif, yaitu tingkat kemampuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap suatu sistem politik, seperti tokoh politik, kebijakan, dan simbol-simbol yang berhubungan dengan sistem politik.

Komponen Afektif, yaitu terkait dengan perasaan warga negara yang nantinya dapat membuat warga negara tersebut dapat percaya dengan sistem politik tersebut.

Komponen Evaluatif, yaitu perasaan yang muncul dari masyarakat terhadap kepuasan objek politik.

Ada beberapa tipologi kebudayaan politik yang bersifat murni, maka dapat dibedakan 3 bentuk kebudayaan politik, diantaranya yaitu:

1. Kebudayaan Subyek-Parokial

Kebudayaan subyek parokial adalah bentuk dari kebudayaan politik yang menjelaskan bahwa masyarakat desa ataupun penduduk di suatu wilayah dan secara turun temurun memilih untuk mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik.

2. Kebudayaan Partisipan-Subyek

Kebudayaan partisipan-subyek ini merupakan sebuah bentuk peralihan dari kebudayaan yang dianggap parokial menuju ke bentuk partisipan.

3. Kebudayaan Parokial-Partisipan

Masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di belahan dunia yang sedang berkembang. Dalam negara yang berkembang, masyarakat lebih banyak memilih untuk menganut budaya parokial yang rata-rata sangat dominan di dalam sebuah negara.

Tipologi Budaya Politik

Ada tiga bentuk tipologi politik yang telah di jelaskan oleh beberapa tokoh, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial khusus membahas tentang peranan di dalam politik dan partisipasinya sangat rendah. Hal ini ditandai dengan tidak meningkatnya perkembangan di dalam sistem politik.

2. Budaya Politik Kaula

Budaya politik ini membahas mengenai masyarakat yang sudah memiliki orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya.

3. Budaya Politik Partisipan

Yang dimaksud dengan budaya politik partisipan yaitu masyarakat dianggap aktif dalam kehidupan politik. Masyarakat secara sukarela ikut andil dalam proses demokrasi di dalam suatu negara.

1.5.3 PEMILU

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Dasim Budiman Syah mendefinisikan Pemilu sebagai suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Sedangkan Paimin Napitupala memberikan pengertian pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan inspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah. Lebih jauh diuraikan oleh beliau bahwa pemilu merupakan prosedur dalam suatu sistem yang bekerja dengan baik, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan elektual bahkan menjadi representative government, yang didalamnya melibatkan begitu banyak organisasi baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah, yang dapat dilihat dari infrastruktur pemerintah bahkan suprastruktur pemerintah, yang mutlak didalamnya harus memuat kemampuan dalam mengatur input menjadi proses output yang baik dan nantinya dapat digunakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh masyarakat yang nantinya juga tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik.

Dedi Mulyadi memberikan pengertian mengenai Pemilu yaitu sebuah mekanisme politik modern untuk menginternalisasikan aspirasi, espektisi dan kepercayaan (*truss*) masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya di lembaga legislatif maupun eksekutif (pusat dan daerah) secara langsung.

1. Adapun fungsi pokok dari Pemilu adalah:

- a. Fungsi keterwakilan (*representative ness*) yaitu di dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok yang didalamnya terdapat wakil yang dilihat dari aspek geografi, dan pengertian jbaran wilayah.
- b. Fungsi integrasi, memiliki pengertian bahwa terdapat partai politik yang menerima partai politik lain dan juga masyarakat luas dapat menerima partai tersebut.
- c. Fungsi mayoritas, yaitu pemilu memiliki cakupan pengertian yang luas, yaitu untuk menjamin stabilitas pemerintah bagaimana dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik (*govern ability*).

Di lain pihak Pamlian menyatakan ada 4 fungsi dari pemilihan umum yaitu,

- a. Pembentukan atau pemupukan kekuatan yang absah,
- b. Mencapai tingkat ketaqwaan politik,
- c. Pembudayaan politik,
- d. Pelebagaan politik.

Di samping ke empat fungsi di atas menurut J. Krisnadi dapat ditambahkan 2 fungsi lagi yaitu: fungsi pengendalian konflik dan pendewasaan politik.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum menurut Arbi Samit adalah: *pertama*, melaksanakan kedaulatan rakyat yang menjamin kepentingan semua golongan, *kedua*, menentukan wakil rakyat yang sekaligus harus melayani penguasa dan rakyat secara seimbang, *ketiga*, membentuk pemerintahan perwakilan lewat OPP pemenang (tunggal atau oposisi), *keempat*, penggantian atau pengakaran elit penguasa; *kelima*, pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi dalam pemilihan umum.

- (1) Memilih Presiden dan wakil Presiden.
- (2) Memilih anggota DPR dan MPR.
- (3) Memilih anggota DPD.
- (4) Memilih anggota DPRD Propinsi.
- (5) Memilih anggota DPRD Kabupaten.
- (6) Memilih anggota DPRD Kota.
- (7) Memilih Kepala Daerah Propinsi atau Gubernur.
- (8) Memilih Kepala Daerah Kabupaten (Bupati).
- (9) Memilih Kepala Daerah Kota atau Walikota.

Pentingnya pemilu juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Karena itu menurut Jimly Assidique pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan sesuatu yang harus dinikmati dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan

tanpa batas yang pasti mengenai waktu penggantinya. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan dapat mengarah menjadi sumber malapetaka sesuai dengan adegium yang dikemukakan oleh Lord Acton sebagai berikut; “Power turn to corrupt, absolute power corrupt absolutely” .

3. Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pemilihan dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum sebanyak lima tahun sekali. Pemilihan ini mencakup banyak hal, diantaranya yaitu dengan perencanaan program dalam proses pemilu itu sendiri. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu ikut andil secara penuh dalam proses pemilu.

Di dalam negeri pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Sedangkan pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud di atas.

5. Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Umum

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemilu, untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

Adapun peserta Pemilu dapat dikategorikan dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta Pemilu untuk memilih anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah Partai Politik. Sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu perseorangan. Persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun kedua ayat dari pasal 8 ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Namun partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu harus mengajukan pendaftaran kepada KPU.

1.5.4 PATRONASE

Patronase adalah salah bentuk yang timbul akibat adanya perjanjian politik yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan pembagian keuntungan antara politisi dan para pegiat kampanye yang dalam proses kampanye calon tersebut mendapatkan banyak dukungan dari beberapa pihak, sehingga secara tidak langsung pembagian keuntungan itu harus ada.

Patronase dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pembagian keuntungan yang dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan baik itu dilakukan secara pribadi maupun dilakukan secara kelompok, dari individu ke individu, kemudian dari individu ke antar kelompok dan dari kelompok ke kelompok yang lainnya. Kegiatan ini juga dapat dilakukan oleh para pegiat kampanye, dilakukan oleh pekerja, dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter, 1977). Patronase dapat dikategorikan sebagai pemberian uang imbalan secara tunai, dapat berupa barang seperti sembako, dapat juga berupa jasa, dan barang ekonomi lainnya, seperti jabatan, pekerjaan, di sebuah kantor, kemudian pembagian proyek pembangunan. Hal ini dapat dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Konsep patronase juga dapat dikategorikan sebagai pemberian uang kepada masyarakat dari uang pribadi maupun dana publik yang berupa pembagian proyek pekerjaan seperti pembuatan jalan raya, pembuatan waduk, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Dalam literatur Ilmu Politik, *Pork barrel* adalah merupakan salah satu bagian dari politik distributif, yaitu politisi melakukan berbagai macam usaha agar mengalokasikan sumber daya mineral yang diperoleh dari negara yang kemudian

nantinya akan diberikan kepada pendukungnya dalam kerangka mobilisasi dukungan dari masyarakat. Banyak politisi yang berencana mengimplementasikan program yang cukup konkret kepada konstituennya yang bermaksud agar dalam pemilu berikutnya dapat terpilih kembali. Praktek ini sudah dilaksanakan di berbagai negara di seluruh negara termasuk negara yang notabene sudah menggunakan sistem demokrasi yang sudah maju.

Pork barrel juga sering disebut sebagai politik distribusi (*distributive politics*) dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi, dapat diwujudkan melalui kontrak kerja, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten atau kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa *pork barrel* sangat berkaitan dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas di daerah aliran sungai, dan perbaikan pelabuhan. Proyek yang mengatasmamakan infrastruktur biasanya digunakan unntuk dalih kesejahteraan masyarakat dan sering dikaitkan dengankonsep porkbarrel. Hal ini bukan berarti bahwa *pork barrel* hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi *pork barrel* juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahtraan (Stokes, 2013).

1.5.5 KLIENTALISME

Klientalisme tidak sama dengan patronase, hal ini dikarenakan dalam pengertian klientalisme secara harfiah memiliki arti bahwa seseorang tersebut merupakan pengikut yang cukup setia terhadap suatu calon tertentu.

Klientalisme yaitu merupakan sebuah jaringan antara beberapa orang yang memiliki jaringan, hubungan ekonomi, hubungan politik, yang didalamnya mengandung elemen iterasi (Aspinall, 2015). Kemudian klientalisme juga sering disebut dengan hubungan antara patron dan klien dan bersifat personal. Maka kemudian dapat dipastikan bahwa klientalisme merupakan faham yang menjelaskan mengenai relasi dan jaringan manusia di dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu politik, klientalisme juga dapat diartikan sebagai suatu jaringan yang dikuasai oleh patron yang bertujuan untuk menekan atau mengintervensi kliennya. Dalam klientalisme sendiri dapat memiliki beberapa elemen, diantaranya yaitu iterasi, asimetri, dan resiprositas.

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL

a. Partisipasi Politik

Menurut penulis, partisipasi politik adalah terlibatnya masyarakat dalam proses politik.

b. Budaya Politik

Budaya politik yaitu sikap yang melekat pada diri seseorang terhadap pandangan dalam berpolitik

c. PEMILU

Pemilu adalah suatu sistem yang terdapat dalam sistem demokrasi yang digunakan sebagai sarana dalam memilih anggota eksekutif dan legistalif.

d. Patronase

Patronase adalah hubungan antara politisi dan pemilih yang didalamnya terdapat imbalan timbal balik secara langsung.

e. Klientalisme

Klientalisme adalah suatu hubungan yang terdapat pada jaringan sosial yang didalamnya terdapat hubungan sosial, ekonomi dan politik maupun budaya. Klientalisme lebih fokus kepada hubungan atau jaringan dari seorang individu ke individu lainnya.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman melakukan suatu aktifitas dan pekerjaan, dengan kata lain, definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksanaan untuk mengukur suatu variabel

Petunjuk dasar yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Blora pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018
 - a. Variable : perbedaan kepentingan
Indikator :
 - Calon tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat.
 - Masyarakat tidak mengenal calon
 - b. Variabel : stuktur sosial
Indikator:
 - Perbedaan kelas sosial
 - Pekerjaan
 - c. Variabel : Pendidikan politik
Indikator:
 - Organisasi politik, sosial masyarakat
 - Pengalaman berorganisasi

2. Faktor yang mempengaruhi pandangan terhadap obyek politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur

a. Variabel : sikap politik

Indikator:

- Kepercayaan politik
- Perasaan terhadap sistem politik

3. Faktor yang mempengaruhi pemilihan umum.

Variabel : pembentukan pemerintah

Indikator :

- Memilih Eksekutif pemerintah
- Memilih legislatif pemerintah

4. Faktor yang mempengaruhi hubungan timbal balik politik

Variabel : keuntungan politik

Indikator :

- Money politik
- Mobilisasi dukungan

5. Faktor yang mempengaruhi relasi politik

Variabel : hubungan politik

Indikator :

- Jabatan politik
- Tingkat ekonomi

1.8 METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian kualitatif, yang artinya dengan menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat yang kemudian akan diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam (depth interview) pada tokoh yang dianggap menguasai permasalahan ini. Alasan penulis mengambil kasus mengenai rendahnya partisipasi politik adalah karena di kabupaten blora partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya begitu rendah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan risetnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Blora

3. Unit analisis data

Yang menjadi objek atau sasaran dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam masyarakat pemilih yang telah terdaftar namanya di daftar pemilih tetap (DPT) di KPU Kabupaten Blora.

4. Jenis sumber data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui data sebelumnya, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui media massa elektronik maupun non elektronik yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi Pustaka, yakni studi atas berbagai data sekunder atau dokumen baik terhadap hukum primer maupun tersier dan klasifikasi berdasarkan materinya masing-masing.

- b. Wawancara mendalam, yakni dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada tokoh yang dianggap mengetahui dan menguasai mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemiluakada langsung Propinsi Jawa Tengah

6. Teknik analisis data

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu model Milles dan Huberman bahwa aktifitas dalam menganalisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses seleksi atau pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah proses untuk mempermudah agar hasil dari reduksi data dapat mudah untuk dipahami. Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif agar dapat mudah dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses tahapan akhir dari analisis data, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah melalui tahap reduksi data dan sudah tersajikan dalam bentuk narasi kemudian langkah terakhir menarik kesimpulan dari temuan yang ada di lapangan.